

“Islam Datang dan Menetap di Thailand”

¹Marissa Grace Haque, ²Nelmida, ³Vidiyanna Rizal Putri, ⁴Denok Sunarsi, ⁵Rr

Vemmi Kesuma Dewi

^{1,2,3}STIE Indonesia Banking School, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

⁴Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

⁵STAI Al-Aqidah Al Hasyimiyah, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

marissa.haque@ibs.ac.id¹, nelmida@ibs.ac.id², vidiputri@ibs.ac.id³, denoksunarsi@unpam.ac.id⁴, vemmi_kesumadewi@alaqidah.ac.id⁵

Abstrak

The Kingdom of Thailand is one of the countries in Southeast Asia with a majority Buddhist Trevada population, but with its open character it is able to accept Islam and give its adherents the freedom to develop. The arrival of Islam for the first time in the Kingdom of Thailand in the city of Ayutthai, leaving a trail of evidence of its presence until now has grown along with the entry of other Muslims from overseas. Even though there has been upheaval in the South because of the forced history, in general the social life of the Muslim community in Thailand is currently in a conducive condition. This study uses a naturalistic qualitative approach.

Kata Kunci: *Thailand, Buddha Trevada, Islam, Muslim Thai, Thai Muslim, Naturalistic Qualitative*

Pendahuluan

Penelitian yang dilakukan terkait dengan kedatangan Islam hingga menetap sampai masa sekarang di wilayah Kerajaan Thailand, menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Thailand merupakan sebuah kerajaan unik di dunia, karena di masa agresi Barat terhadap wilayah Timur dan Tenggara tidak pernah terjajah. Sekalipun, di masa perkembangan politiknya di kemudian hari, ternyata kerap juga menghadapi pergolakan di dalam negeri. Kerajaan Thailand ini memiliki nama resmi lain yang tak banyak diketahui, yaitu: (1) Ratcha Anachak; (2) Prathet Thai; dan (3) Mueang Taek. Kerajaan ini berlokasi di bagian timur berbatasan dengan Cambodia, di bagian barat berbatasan dengan negara Myanmar serta laut Andaman, di lain sisi di belahan Selatan, berbatasan dengan Malaysia dan teluk Siam. Dengan luas total dari wilayah kerajaan mencakup luas hingga 510.000 kilometer persegi.



Gambar 1.1 Peta Kerajaan Thailand (Sumber: www.google.com)

Kerajaan Siam adalah nama asal dari Kerajaan Thailand. Perubahan nama yang bersejarah itu terjadi pada tanggal 11 Mei tahun 1949. Nama Kerajaan

Thailand ราชอาณาจักรไทย sendiri merujuk kepada “suku Taek” dari Siam, yang memiliki makna kata “kebebasan”, sesekali juga sering disebut sebagai *Ratcha Anachak Thai*, *Prathēt Thai*, juga *Mueang Taek* (Mania, 2019).

Yang paling menarik adalah nama lain dari ibukota Kerajaan Thailand ini, yaitu kota Bangkok. Siapa yang menyangka jika sesungguhnya nama kota Bangkok yang asli sangatlah panjang, yaitu: “*Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit*”, yang artinya adalah “Kota para malaikat, kota yang hebat, rumah para Buddha yang agung, kota dewa Indra yang kuat, sang ibukota dunia yang diukir dengan Sembilan batu mulia indah, kota yang bahagia, kaya dengan istana raja yang menyerupai singgansana surga, kerajaan dewa yang menjelma, kota dewa Indra dan dibangun oleh dewa Whisnu” (Dania, 2016). Sejak masa lalu, oleh karena terlalu panjang dan sulit untuk dihafalkan, sering disingkat menjadi hanya “*Krung Thep*” yang memiliki arti sebagai “*the city of angel*” semata. Sementara nama “Bangkok” yang kini dikenal luas di dunia sesungguhnya berasal dari kata buah “Kedondong” yang di dalam bahasa Siam disebut “*Makok*” yang bertaut dengan kata “tepiian sungai” Chao Phraya yang di dalam bahasa Siam disebut “*Bang*” (Haque-Fawzi, *et.al*, 2019). Nama Bangkok sendiri diberikan oleh para penduduk lokal Thailand saat itu karena memang kawasan di dekat sungai Chao Phraya, adalah pilihan Raja Thaksin yang berkuasa saat itu di sekitar tiga ratus tahun lalu sebagai pengganti ibukota lama Kerajaan Siam sebelumnya yang bernama Ayutthaya.

Sekalipun bahasa Inggris digunakan secara luas di Kerajaan Thailand, namun mereka memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Thai. Kerajaan Thailand berpenduduk sekitar 68 juta orang, dimana etnis Thai serta Laos sekitar 75 persen dari 68 juta penduduk mendominasi, sementara lainnya adalah beragam etnis dari Mon Khmer, etnis China (mayoritas tinggal di Thailand utara), etnis Melayu (mayoritas tinggal di Thailand selatan), termasuk beragam suku lokal kecil-kecil yang tinggal di perbukitan semisal suku Karen yang dikenal berleher panjang dengan kalung besi melingkar tinggi di sepanjang lehernya, termasuk juga suku Akha, Lisu, Mong, Yao, Tai Lue, dengan busana warna-warni serta perhiasan peraknya, dimana mereka bertempat tinggal di wilayah Chiang Rai, Thailand Utara. Secara geografis wilayah memang Kerajaan Thailand berbatasan dengan beberapa negara lain, sehingga ragam akulturasi yang terjadi memang tergantung wilayah Kerajaan Thailand itu yang bersebelahan dengan negara mana serta dengan kultur bagaimana. Hal tersebut dapat dilihat dari beragam busana tradisional setempat mereka, semisal wilayah yang di sebelah barat dan agak utara berbatasan dengan Myanmar serta Laos, di timur berbatasan dengan Cambodia, sedangkan di Selatan berbatasan dengan Malaysia, akan terpengaruh olehnya (Atikbud RI Bangkok, 2017).

Sementara topografi di wilayah Kerajaan Thailand juga tak kurang beragamnya. Yaitu, semisal di sebelah utara dan di barat keadaannya berbukit, bergunung dan berlembah, di selatan bersemenanjung, di tengah berlahan pertanian subur, di timur berpantai serta di timur laut bersungai yang berbatasan dengan sungai Mekong. Daerah bergunung-gunung yang tinggi di utara mempunyai titik tertinggi yaitu di Doi Inthanon, dengan ketinggian 2.576 meter dari atas permukaan laut (KBRI Bangkok, 2017). Wilayah Kerajaan Thailand memiliki iklim tropis yang ramah dengan suhu rata-rata sekitar 28 derajat Celcius, secara unik terbagi menjadi tiga musim. Yaitu: (1) Musim Semi yang jatuh di bulan Maret-Mei; (2) Musim Hujan yang jatuh di bulan Juni-September; dan (3) Musim Dingin yang jatuh di bulan Oktober-Februari. Secara geografis wilayah Kerajaan Thailand berbatasan dengan beberapa negara, antara lain di sebelah barat dan agak utara berbatasan dengan Myanmar serta Laos, di timur berbatasan dengan

Cambodia, sedangkan di Selatan berbatasan dengan Malaysia. Topografi di wilayah kerajaan Thailand juga berbeda-beda, semisal di sebelah utara dan di barat keadaannya berbukit, bergunung dan berlembah, di selatan bersemenanjung, di tengah berlahan pertanian subur, di timur berpantai serta di timur laut bersungai yang berbatasan dengan sungai Mekong. Daerah bergunung-gunung yang tinggi di utara mempunyai titik tertinggi yaitu di Doi Inthanon, dengan ketinggian 2.576 meter dari atas permukaan laut (KBRI Bangkok, 2017).



Mata uang Kerajaan Thailand adalah “*Bhat*”, namun untuk beberapa kondisi mereka juga menerima pembayaran dalam transaksi keseharian dengan US Dollar. Malah sering agak mengagetkan ketika mereka juga jika dalam keadaan terpaksa, bersedia menerima pembayaran dalam Rupiah, asalkan uang kertas dalam kondisi tidak kusut serta sobek.

Gambar 1.2. Peta Lima Changwat di Thailand (Sumber: www.google.com)

Kerajaan Thailand memiliki banyak provinsi lebih banyak dari Indonesia. Provinsi di kerajaan ini disebut dengan “*Changwat*.” Setiap *Changwat* akan memiliki ibukota provinsinya. Kerajaan Thailand memiliki sebanyak total 76 buah *Changwat*. Lalu, *Changwat* ini dikelompokkan menjadi lima buah kelompok besar yang isinya terdiri dari sejumlah provinsi yang tidak sama jumlahnya. Yaitu terbagi atas kelompok *Changwat*: (1) Thailand Utara; (2) Thailand Tengah; (3) Thailand Timur; (4) Thailand Timur Laut; dan (5) Thailand Selatan. Kemompok dari masing-masing *Changwat* tersebut, terdiri dari:

Thailand Utara:

Provinsi Chiang Mai; (2) Provinsi Chiang Rai; (3) Provinsi Kamphaeng Phet; (4) Provinsi Lampang; (5) Provinsi Lamphun; (6) Provinsi Mae Hong Son; (7) Provinsi Nakhon Sawan; (8) Provinsi Nan; (9) Provinsi Phayao; (10) Provinsi Phetchabun; (11) Provinsi Phichit; (12) Provinsi Phitsanulok; (13) Provinsi Phrae; (14) Provinsi Sukhothai; (15) Provinsi Tak; (16) Provinsi Uthai Thani; (17) Provinsi Uttaradit;

Thailand Timur:

Provinsi Chachoengsao; (2) Provinsi Chanthaburi; (3) Provinsi Chonburi; (4) Provinsi Rayong; (5) Provinsi Prachinburi; (6) Provinsi Srakaeo; (7) Provinsi Trat;

Thailand Timur Laut:

Provinsi Amnat Charoen; (2) Provinsi Buriram; (3) Provinsi Chaiyaphum; (4) Provinsi Kalasin; (5) Provinsi Khon Kaen; (6) Provinsi Loei; (7) Provinsi Maha Sarakham; (8) Provinsi Mukdahan; (9) Provinsi Nakhon Phanom; (11) Provinsi Nakhon Ratchasima; (12) Provinsi Nongbua Lamphu; (13) Provinsi Nong Khai; (14) Provinsi Roi Et; (15) Provinsi Sakhon Nakhon; (16) Provinsi Sisaket; (17) Provinsi Surin; (18) Provinsi Ubon Ratchathani; (19) Provinsi Udon Thani; (20) Provinsi Yasothon;

Thailand Tengah:

Provinsi Ang Thong; (2) Provinsi Ayutthaya; (3) Provinsi Bangkok; (4) Provinsi Chainat; (5) Provinsi Kanchanaburi; (6) Provinsi Lopburi; (7) Provinsi Nakhon Nayok; (8) Provinsi Nakhon Pathom; (9) Provinsi Nonthaburi; (10) Provinsi Pathumtani; (11) Provinsi Phetchaburi; (12)

Provinsi Prachuap Khiri Khan; (13) Provinsi Ratchaburi; (14) Provinsi Samut Prakan; (15) Provinsi Samut Sakhon; (16) Provinsi Samut Songkhram; (17) Provinsi Saraburi; (18) Provinsi Singburi; (19) Provinsi Suphanburi.

Thailand Selatan:

Provinsi Chumphon; (2) Provinsi Krabi; (3) Provinsi Nakhon Si Thammarat; (4) Provinsi Narathiwat; (5) Provinsi Pattani; (6) Provinsi Phang Nga; (7) Provinsi Phattalung; (8) Provinsi Phuket; (9) Provinsi Ranong; (10) Provinsi Satun; (11) Provinsi Songkhla; (12) Provinsi Surat Thani; (13) Provinsi Trang; (14) Provinsi Yala.

Menurut Yumetri (2020), bahwa setiap provinsi memiliki distrik, dimana beberapa provinsi tersebut di atas, kemudian dibagi lagi total sejumlah 795 distrik yang disebut "*Amphoe*." Dari sejumlah sejumlah 795 distrik, muncul 81 buah sub-distrik yang disebut "*King Amphoe*." Namun, ada kekhususan untuk distrik ibukota Thailand. Kota Bangkok diberi nama khusus sebagai "*Khei*."

Mirip dengan suasana bermasyarakat di Indonesia, Thailand juga punya basis komunitas yang disebut "*Tambon*" sejumlah 7.236 buah. Disusul dengan desa dengan nama lokal "*Muban*" sejumlah 55.746 buah, lalu kotamadya dengan nama lokal "*Tesaban*" sejumlah 123 buah. Lebih jauh dan sangat unik, oleh karena Thailand memiliki distrik khusus sanitasi yang disebut dengan nama lokal "*Sukhaphiban*" sejumlah 729 buah (<https://www.thaitambon.com>, diunduh pada 14 Mei 2021)

2. Buddha Trevada di Thailand

Dua negara tua dunia yaitu: (1) China; dan (2) India, menorehkan pengaruhnya kepada kebudayaan di Kerajaan Thailand. Sekalipun, Kerajaan Thailand dari sisi perjalanan sejarahnya memiliki catatan sejarah uniknya sendiri.

Perjalanan sejarah Kerajaan Thailand dimulai dari awal terbentuknya sebuah kerajaan bernama "Kerajaan Sukhotai" yang berumur pendek, yang didirikan pada tahun 1238 Masehi. Dimulai dari Kerajaan Sukhothai, kemudian berganti dengan Kerajaan Ayutthai, lalu berkembang menjadi Kerajaan Siam, hingga terbentuklah Kerajaan Thailand modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Kerajaan Thailand pada zaman dahulu itu telah menggunakan kalender mereka sendiri di dalam Bahasa Sansekerta yang didasarkan atas hitungan tahun Buddha yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan dengan kalender Masehi dari Barat.

LePoer (1987) menjelaskan bahwa pada pertengahan abad ke 14, perubahan Kerajaan Sukhotai diteruskan oleh kerajaan baru yang lebih besar bernama Ayutthaya. Lebih jauh, LePoer (1987) juga merinci keterangannya, bahwa Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada tahun 1350 Raja Ramathibodi I (Uthong), yang lalu pada tahun 1376 kemudian menjadikan Ayyuthaya sebagai ibu kota kerajaannya untuk meudian mengalahkan dinasti Kerajaan Sukhothai. Di dalam perkembangannya, Ayyuthaya sangat aktif melakukan perdagangan dengan berbagai negara asing seperti: (1) Tiongkok; (2) India; (3) Jepang; (4) Persia, dan (5) beberapa negara Eropa lainnya. Dari sini cikal bakal karakter terbuka masyarakat Kerajaan Thailand terbentuk hingga kini.

Selesai dari Kerajaan Ayutthai, era Kerajaan Siam dimulai. Pasca serbuan Burma yang membumihanguskan ibu kota Ayutthaya, Jenderal Taksin mendirikan kerajaan baru pada tahun 1769 yang beribu kota di Thonburi (dalam peta kekinian masuk ke dalam peta ranah kota Bangkok) dan menyatukan kembali bekas kerajaan Ayutthaya. Jenderal Taksin yang di kemudian

kemudian dianggap gila, lalu dieksekusi tahun 1782. Setelah kematiannya, Jenderal Taksin digantikan oleh Jenderal Chakri, Lalu, Jenderal Chakri inilah yang dikemudian hari menjadi raja pertama dinasti Chakri dengan sebutan nama Rama II (<http://countrystudies.us/thailand/17.htm>, diunduh pada 14 Mei 2021).

Perjalanan sejarah kemudian mencatat bahwa para penerus Rama I harus menghadapi ancaman kolonialisme Eropa setelah kemenangan Britania di Burma tahun 1826. terdapat kejadian penting ketika di tahun yang sama Siam menandatangani perjanjian dengan Britania Raya, dilanjutkan pada tahun 1833 Siam menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Perjanjian signifikan terjadi ketika pada tahun 1909, Inggris-Siam menentukan batas-batas Siam dengan Malaya, sementara di sis lainnya terjadi juga serangkaian perjanjian dengan Prancis untuk mematok batas timur kerajaan dengan Laos dan Kamboja.

Sekalipun negara-negara Eropa yang pernah berhubungan dengan kerajaan Thailand pada abad ke-16 melakukan tekanan kuat, termasuk ancaman kekerasan, namun Kerajaan Thailand hingga kini dikenal sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Namun, pengaruh kehadiran negara-negara Eropa tersebut di Asia Tenggara telah turut memberikan pengaruh budaya dan peradaban Barat pada kerajaan Thailand. Yang mengakibatkan bahwa pada abad ke-19 mengakibatkan beragam perubahan termasuk di dalamnya diberikannya banyak kelonggaran bagi para pedagang yang datang dari Inggris Raya.

Kejadian besar pada tahun 1932 adalah kudeta mengakhiri monarki absolut di Thailand, dan mengawali munculnya kerajaan Thailand modern. Kerajaan Thailand yang sebelumnya bernama Kerajaan Siam, pada tahun 1932 tersebut mengalami sebuah revolusi tak berdarah yang mengakibatkan dimulainya sistem Monarki Konstitusional, lalu pada tahun 1939 perubahan nama kerajaan Siam secara resmi menjadi nama Thailand, dengan sekali kejadian pernah kembali ke nama Siam pasca Perang Dunia II saat kerajaan Thailand menjadi sekutu Jepang. Namun, setelah Perang Dunia II lalu menjadi sekutu Amerika Serikat nama Thailand kembali digunakan hingga kini. Kerajaan Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an, dengan beberapa kali mengalami kudeta dalam negeri pada tahun-tahun setelah berakhirnya perang. Raja di kerajaan Thailand mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi, namun seorang raja di Thailand merupakan pelindung Budhisme Trepada Thailand, serta lambang jati diri serta persatuan bangsa, sangat dihormati karena juga dianggap sebagai pemimpin moral sekaligus spiritual.

Ketika krisis politik terjadi di kerajaan Thailand, dan Perdana Menteri berhalangan hadir dalam kepemimpinannya, maka raja Thailand yang melantik Perdana Menteri baru termasuk juga para anggota parlemen. Parlemen di Thailand menggunakan dua sistem kamar, yang dinamakan dengan Majelis Nasional atau Rathasapha, terdiri dari Dewan Perwakilan atau Sapha Phuthaen Ratsadon yang beranggotakan 480 orang yang menjalani masa bakti selama empat tahun, dan Senat atau *Wuthisapha* yang beranggotakan 150 orang yang menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan Kehakiman tertinggi disebut Mahkamah Agung atau Sandika (Thai Embassy Riyadh, 2017). Penduduk Thailand mayoritas beragama Budha dengan aliran Budha Threpada, dengan penduduk Muslim sekitar 12 persen, dengan sisa minoritas lainnya adalah Kristen sebanyak 0,2 persen, lalu sisanya sebanyak 0,08 persen lainnya berupa campuran dari para penganut Hindu, Sikh, dan Konfusius (Kantor Statistik Nasional Thailand, 2005).

3. Islam Hadir di Thailand

Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 Masehi bersamaan dengan awal penyebaran Islam oleh para sahabat Rasulullah Muhammad melalui para pedagang dari jazirah Arab ke Kerajaan Pattani Raya atau Pattani Darussalam. Penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah 'paket' kesatuan dakwah Islam dari jazirah Arab pada masa khalifah Umar Bin Khatthab. Lebih lanjut secara historis, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, di Malakka, Aceh (Nusantara), serta Malayan Peninsula termasuk daerah Melayu yang ada di daerah Siam (Thailand).

Keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Pattani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum Kerajaan sebelum kerajaan Sukhotai cikal-bakal kerajaan Siam atau Thailand lahir. Secara garis besar kini, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) masyarakat Muslim sebagai penduduk asli, berada di Pattani (Thailand selatan); dan (2) masyarakat Muslim imigran (pendatang) yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai (Thailand tengah dan utara).

Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Pattani Raya atau Pattani Darussalam (Pattani berasal dari kata *al-Fattani* yang berarti kebijaksanaan). Bermula dari masa dimana jauh sebelumnya, pada masa awal sejarah Thailand berdiri, ditandai dengan lahirnya sebuah kerajaan berumur pendek bernama Sukhotai, dimana sejak abad ke-12 sudah hadir kerajaan Pattani Raya atau Pattani Darussalam di wilayah selatan kerajaan tersebut. Di wilayah bagian selatan Kerajaan Thailand dimana mayoritas penduduknya adalah Muslim, berada di wilayah yang dikenal sebagai wilayah Pattani Raya atau Pattani Darussalam dahulu itu. Dan sekarang ini dapat kita dijumpai di Provinsi: (1) Pattani; (2) Yala; (3) Narathiwat; (4) Satun; (5) dan Songkhla.

Kerajaan Thailand adalah sebuah negara dengan karakter terbuka berlandaskan spiritual Budha Trevada yang memiliki karakter baik serta terbuka. Sehingga, secara harmoni mampu berkompromi menciptakan manajemen komunikasi produktif bagi kepercayaan lainnya. Yaitu salah satunya adalah dengan 'memberikan ruang' bagi para pemeluk agama Islam untuk melaksanakan ibadahnya, serta melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Di bawah naungan kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan yang langsung bertanggungjawab langsung kepada raja Thailand, seseorang *mufti* yang memperoleh gelar *Syaikhul Islam* atau *Chularajmontree* di Thailand, bertanggungjawab atas masalah keagamaan Islam, di dalam hal kewenangannya mengatur kebijakan atau *policy* yang terkait dengan kehidupan masyarakat Muslim atau ummatnya (<https://www.islaminthailand.org/dp8/>, diunduh pada 14 Januari 2014). Ummat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Secara umum di seluruh penjuru Thailand terlihat kantong pemukiman Muslim untuk mengembangkan pendidikan Islam-nya. Proses pendidikan Islam Thailand mengalami perkembangan dan kemajuan, dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam seperti pada umumnya di Indonesia. Semisa: (1) pengajian pria dan wanita; (2) TPA (Taman Pendidikan Al-Quran)/TKA (Taman Kana-kanak Al-Quran); dan (3) kajian mingguan mahasiswa. Bahkan kini dalam konteks Indonesia, masyarakat dan pelajar Muslim Indonesia di Thailand juga tak ketinggalan mengadakan silaturahmi bulanan di dalam forum pengajian *Ngaji Khun*, yang dilaksanakan di berbagai wilayah di seluruh wilayah Kerajaan Thailand.

Terdapat sebuah masjid bernama “Masjid Jawa” di wilayah Sathorn kota Bangkok, yang keberadaannya turut ‘naik daun’ disebabkan oleh karena salah seorang keturunan pendirinya yang bernama Prof. Winai Dahlan, berhasil dalam perjuangan *dakwah bil hal*-nya sejak tahun 1994 lalu. Sehingga kini melalui konvergensi halal dengan sains serta teknologi terkait dengan industri di Thailand, membuat pemerintah Kerajaan Thailand dapat meningkatkan nilai ekspor hasil industry halal tahunannya ke beragam tujuan mancanegara. Memang sejak tahun 1850-an, masyarakat Jawa banyak yang bermukim di ibukota Thailand, Bangkok. Disusul dengan perkembangan Islam yang semakin pesat saat pada akhir abad ke-19. Beberapa pekerja Muslim dari Indonesia dan Malaysia masuk ke Thailand. Mereka datang dan sebagian lagi menetap dengan beragam alasan serta pertimbangan ke negeri Gajah Putih, Thailand. Sebagian datang untuk berdagang lalu ada yang menetap, sementara sebagian besar lainnya lagi datang untuk membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di *Krung Theyp Mahanakhon* (yang sekarang dikenal sebagai Propinsi Bangkok). Serta mereka para imigran Jawa tersebut mendapatkan kepercayaan khusus untuk mengelola taman-taman indah milik kerajaan. Sebagian besar para imigran Jawa yang tinggal di ranah Kerajaan Thailand tersebut menganut keyakinan agama Islam walau sebagian lagi sebagai Jawa Abangan (<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/10/31/phgh0b313-jejak-komunitas-muslim-jawa-di-bangkok>, diunduh pada 15 Mei 2021).

Data resmi dari Office of the National Economic and Social Development Board Thailand (2006) menunjukkan, bahwa di kota Bangkok memiliki 160 masjid. Dan dari masjid-masjid inilah, para Muslimin di kota Bangkok yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 1 juta orang, melakukan beribadahnya. Mereka, pertama kali datang ke Bangkok pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn di pertengahan abad ke-19. Sejarah mencatat, orang-orang Jawa ini datang ke Thailand, termasuk Bangkok, dengan alasan ekonomi. Selama Perang Dunia II, banyak pula orang Jawa yang tiba di negeri ini. Mereka adalah tahanan Jepang dari Jawa yang dibawa ke Thailand untuk bekerja membangun rel kereta api. Rel ini menghubungkan Thailand dan Myanmar. Setelah Jepang kalah perang, tahanan yang masih hidup lebih memilih menetap di Thailand ketimbang kembali ke Tanah Air (Thailand PRD – กรมประชาสัมพันธ์, <https://thailand.prd.go.th>, diunduh pada 15 Mei 2021).

4. Muslim Thai vs Thai Muslim

Thailand adalah sebuah nama bagi negara kerajaan di tengah-tengah kawasan Asia Tenggara, yang memiliki banyak keunikan dan pengecualian. Unik, karena menurut latar belakang sejarahnya, sebelum tahun 1939 disebut sebagai kerajaan Siam, menjadi destinasi utama pedagang India dan China di masa lalu. Tak heran jika hingga kini karakter huruf di dalam tulisannya masih menggunakan karakter yang diadaptasi dari alfabet Sansekerta yang berasal dari India, dan cara pengucapan bahasanya yang terdiri dari lima intonasi nada diadopsi dari bahasa China.

Kerajaan Thailand adalah sebuah wilayah yang tak pernah mengalami penjajahan bangsa Eropa. Bagi masyarakat Thai, penjajahan berarti membiarkan pengaruh budaya asing masuk dan merusak nilai kearifan lokal dan sejarah yang seharusnya dijaga dan dipertahankan oleh setiap bangsa. Sebagai gantinya, para raja di kerajaan Siam, khususnya Raja Chulalongkorn (Rama V) meakukn negosiasi. Yaitu melalui salah satu strateginya, dengan menawarkan kerjasama ekonomi dan budaya dengan para bangsawan Eropa hingga Rusia. Memang, Raja Chulalongkorn (Rama V) ini tercatat dalam sejarah dunia sebagai seorang tokoh raja yang selain paling dihormati di wilayah Kerajaan Thailand oleh rakyatnya, juga oleh karena kelihaiannya di dalam melakukan

diplomasi dengan pihak internasional (Barat), sehingga terbukti mampu menghindarkan masyarakat Thailand dari kehancuran dan sengsara ekonomi akibat perang.

Hingga saat ini Thailand dikenal sebagai sebuah negeri penganut ajaran Buddha Trevada, seperti yang selama ini diajarkan dan diamalkan oleh para rajanya. Lebih dari 90 persen penduduknya mengamalkan pola hidup dan cara berpikir yang sesuai dengan ajaran Buddha, atau dengan cara pencarian diri yang sejati melalui meditasi. Dengan berlandaskan filsafat reinkarnasi, masyarakat Thai percaya bahwa kehidupan di dunia adalah sebuah siklus dan hanya mereka yang mampu menghentikan nafsu duniawi saja yang dapat melepaskan diri dari jeratan siklus lingkaran kelahiran, lalu masuk dalam kebahagiaan abadi atau disebut sebagai Nirwana. Jika tidak mampu menghentikan nafsu, maka cukup menahan diri dan mencoba agar terlahir kembali dengan derajat lebih tinggi (Forbes and Henley, 2012).

Karakter Buddha Trevada ini telah menjadi karakter bangsa Thai hingga sekarang dan turut mempengaruhi bagaimana cara orang-orang Thailand berpikir serta bertindak. Etika sosial dan moralitas kemanusiaan menjadi adab yang paling utama dan dijunjung tinggi di negeri Gajah Putih Thailand ini. Hal inilah yang membentuk masyarakat Thai menjadi



“*adapt dan adopt.*” Terbuka, serta senang menerima serta mempelajari suatu budaya dan ajaran baru, yang bertujuan baik, tanpa merusak atau menghilangkan kepercayaan turun-temurun, serta untuk menghasilkan hal yang bermanfaat bagi masa depan. Maka, bukan menjadi hal yang aneh lagi ketika Islam masuk ke Thailand, masyarakat dan penguasa negeri Siam menyambut serta menerima dengan baik ajaran penganut agama Islam untuk menetap, bertempat-tinggal, dan berkembang, di negeri Kerajaan Siam itu. Penyebutan identitas ini tentu saja memiliki alasan kultural sangat kuat.

Gambar: 1.3 Raja Chulalongkorn (Rama V) (Sumber: www.google.com)

Meskipun demikian tetap saja ada perbedaan yang sangat mendasar, untuk menyebut identitas seorang Muslim di Thailand yang tidak bisa disebut dengan Thai Muslim tapi Muslim Thai.

Penyebutan “Muslim Thai” artinya menunjukkan bahwa identitas para Muslim yang tinggal di Thailand bukanlah penduduk asli Thailand. Muslim Thai adalah mereka yang beragama Islam, yang datang dari berbagai etnis ke tanah Siam, dan diterima dengan baik oleh penduduk lokal Siam beserta para penguasa negerinya. Sedangkan penyebutan “Thai Muslim” tidak disepakati penggunaannya, karena mengandung makna jika seakan etnis Siam itu memang aslinya Muslim. Logika ini ditolak, dengan alasan bahwa kepercayaan resmi di kerajaan Siam adalah Budhisme, dan tradisi kepercayaan ini telah membangun identitas masyarakat Thailand dari dulu hingga kini (Dania, 2016). Hal tersebut juga untuk mempertegas bahwa bahwa agama resmi di Thailand adalah agama Budha, lalu Islam bukanlah agama lokal masyarakat Thailand. Meskipun Islam di Thailand adalah agama terbesar ke dua, sebesar 12 persen pada tahun 2017 lalu (Thai Embassy Riyadh, 2017).

Akar sejarah penyebutan orang Islam di Thailand adalah Muslim Thai bukan Thai Muslim, dimulai pada tahun 1602. Tepatnya ketika dimulainya masa konversi Islam di Asia Tenggara, dengan kedatangan para pedagang Muslim yang diterima dengan baik oleh penguasa Kerajaan Ayutthaya saat itu (kini Ayutthaya menjadi provinsi besar di Thailand), lalu sebagian dari para

pedagang Muslim tersebut menjadi migran tetap di sana. Muslim Thai sendiri adalah keturunan pendatang dari enam etnis utama, yaitu: (1) Persia; (2) China; (3) Cham-Khmer; (4) Asia Selatan yang terdiri dari India, Pakistan, Bengali; (5) Melayu; dan (6) Indonesia (Haque-Fawzi, *et.al*, 2019).

Ajaran Islam yang pertama dibawa oleh orang Persia (sekarang Iran) ke Ayutthaya dengan tujuan untuk berdagang, juga sekaligus membawa kabar Islam. Tokoh utama Iran yang paling terkenal adalah "Sheikh Ahmad Qumi" dari negeri Qum. Salah seorang dari 12 imam besar aliran Islam Syiah, yang pertama kali menyebarkan Islam *Shi'ism* di Thailand, dan mendapatkan gelar *Chao Phraya Bovornrajanyok* atau artinya warganegara yang paling setia dan taat. Hingga kini makam dan monumen Sheikh Ahmad Qumi masih dapat ditemukan di kota Ayutthaya, Thailand.

Sheikh Ahmad Qumi ini merupakan tangan kanan dari Raja Naresuandari Kerajaan Ayutthaya pada masa itu, ia memegang posisi ahli strategi maritim kerajaan dan penasehat utama dari kementerian keuangan kerajaan pada tahun 1610. Selama masa kepemimpinannya, Sheikh Ahmad Qumi membangun masjid, areal pemakaman, hingga perumahan bernafaskan Islam-Persia di Ayutthaya. Saat ini lokasi yang dulu dibangun oleh Sheikh Ahmed Qumi dikenal sebagai kawasan Ban Khat Kufi Chao Sen (Marchinkowski, 2005). Sheikh Ahmad Qumi juga ditunjuk sebagai *Syaikhul Islam* yang pertama di Thailand, pemimpin umat Islam dan pengurus semua urusan Islam di Kerajaan Ayutthaya atau yang hingga kini disebut sebagai *Chula Rachamontri*. Yang maknanya *Chula* adalah *Shura'* atau *Sura'* atau majelis Islam, sementara *Racha* adalah kerajaan, dan *Montri* adalah penasehat. Gelar ini berarti Penasehat Utama dari Majelis Islam yang ditunjuk oleh Kerajaan Siam (kini bernama Thailand).

Etnis yang tak kalah pentingnya bagi penyebaran Muslim Thai di Thailand adalah etnis China, yang mayoritas berasal dari kawasan Hui di Provinsi Yunnan di Tiongkok. Muslim Thai dari etnis China yang turut menyebarkan Islam ini menempati wilayah utara Thailand, seperti di Chinag Rai, Chiang Mai, serta beberapa provinsi lain di wilayah pegunungan Thailand utara lainnya. Gelombang migrasi Muslim etnis China di Thailand dipicu oleh kemenangan partai komunis pimpinan Mao Zedong di China yang merepresi keberadaan para Muslim di China sehingga mendesak mereka untuk melarikan diri guna mempertahankan akidah.

Berikutnya adalah Muslim etnis Cham yang berasal dari sejarah Kerajaan Champa. Di masa pemerintahan Raja Chulalongkorn pada tahun 1800-an, masyarakat Muslim Cham dari Kerajaan Champa yang berada di sekitar wilayah Vietnam dan Cambodia saat ini, masuk ke Thailand untuk ikut berperang membantu Raja Chulalongkorn melawan agresi pasukan tentara Perancis. Atas jasa mereka itulah, kemudian Raja Chulalongkorn memberikan tanah di wilayah Kerajaan Thailand untuk para Muslim Cham yang berjasa tersebut. Saat ini wilayah tanah hadiah Raja tersebut di kota Bangkok dikenal dengan nama Ban Krua. Para pahlawan Muslim Cham tersebut turun-temurun, lalu kemudian berkembang, membawa nama baik bagi Kerajaan Thailand di mata internasional melalui keahlian mereka dalam hal menenun kain sutra berkualitas tinggi. Bahkan, keluarga kerajaan Thailand selalu memakai kain sutra kualitas terbaik asal Ban Krua yang awalnya dulu didapatkan sebagai hadiah dari keluarga Muslim etnis Cham di Thailand. Bahkan sutra kualitas terbaik asal Ban Krua ini pada tahun 1959 menarik minat seorang asal Amerika Serikat bernama Jim Thompson untuk melebarkan penjualan sutra Thailand hingga New York. Hingga kini, produk kain tenun sutra Thailand menjadi komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional.

Etnis yang turut menyumbang populasi Muslim Thai adalah Muslim etnis Asia Selatan, yang di dalamnya merupakan gabungan dari India, Bengali (Bangladesh), dan Pattani (Patani). Muslim Pakistan juga disebut sebagai Patan, dan mereka hingga saat ini mendominasi wilayah Pattani

di wilayah selatan Thailand. Masyarakat Muslim etnis Asia Selatan ini sangat mahir berbisnis. Bisnis adalah aliran darah dan nafas mereka secara turun-temurun. Keluarga Muslim etnis Asia Selatan Patan di Thailand menguasai bisnis perhiasan di Thailand juga “jagal daging.” Keluarga Nana atau Nana Family adalah salah satu nama keluarga dari etnis ini yang dikenal berhasil dalam bisnis dan sering diidentikkan sebagai Milyader-nya Thailand. Bahkan Mr. Lek Nana salah seorang keturunannya pernah menjabat sebagai Menteri Teknologi Thailand. Keluarga lain yang berasal dari India Muslim adalah keluarga Siamwalla atau Siamwalla Family, dikenal sebagai keluarga ahli ekonomi Thailand, sekaligus sebagai Ketua Organisasi Women’s Foundation di Thailand.

Penyebaran Islam di Thailand masih secara lebih masif ketika Kerajaan Siam berinteraksi dengan etnis Melayu. Sebutan Orang Melayu Thailand (dalam bahasa Thai: ไทยเชื้อสายมลายู) adalah sebuah istilah yang merujuk pada etnik Melayu di Thailand. Etnis Melayu di Thailand menempati urutan ketiga terbesar setelah Malaysia dan Indonesia. Orang Melayu Thailand tersebar menempati beberapa provinsi utama, di kawasan Thailand selatan, antara lain: (1) Pattani; (2) Narathiwat; (3) Yala; (4) Songkhla; dan (5) Satun. Mayoritas Muslim Thai beretnis Melayu tersebut kini menempati berbagai posisi penting di pemerintahan Thailand. Salah satu contoh paling signifikan adalah kehadiran almarhum Dr. Surin Pitsuwan, mantan menteri Luar Negeri Thailand, dan mantan Sekjen ASEAN 2008-2012 lalu. Beliau baru saja berpulang ke rahmatullah tepat di dalam perjalanan di hari pertama saat awal pembukaan Halal Expo di Bangkok Thailand yang diadakan di Bitec Bangna, kota Bangkok pada tanggal 29 November - 3 Desember 2017 lalu. Almarhum merupakan salah satu tokoh kebanggaan masyarakat Muslim Thailand. Kebijakan “*Look West Policy*” dari Dr. Surin Pitsuwan dikenal telah membuat politik luar negeri Thailand semakin menguat. Sebagai Sekjen ASEAN Dr. Surin Pitsuwan bahkan juga telah meningkatkan kerjasama ASEAN dengan banyak negara Islam di dunia terkait bidang investasi serta perdagangan.

Berbeda dengan Muslim etnis non-Melayu yang cenderung lebih asimilatif, sejarah mencatat jika Muslim etnis Melayu menemui kesulitan untuk menjadi bagian yang integratif dengan budaya Thailand. Akibatnya, sejumlah besar gerakan separatisme khususnya di Thailand selatan, muncul. Upaya penyelesaian dari pemerintah Thailand di awal kejadian dalam upaya untuk menekan separatisme yang bersifat represif, justru berakibat luka psikologis sangat dalam dan ‘menahun’. Konflik lokal di wilayah selatan tersebut pada akhirnya menciptakan urgensi baru guna mendapatkan solusi alternatif. Pemerintah Thailand kemudian mengevaluasi kebijakan asimilasi dan integrasi yang telah dikeluarkannya.

Sesungguhnya adalah lebih bijaksana jika sebuah pemerintahan mampu ‘membaca’ sejarah dengan menengok lebih jauh ke belakang, mengapa gerakan separatisme di wilayah selatan Thailand terjadi. Sebagaimana di Indonesia juga pernah terjadi semisal di Aceh dan di Papua. Biasanya kesimpulan awal didapatkan bahwa gerakan separatisme bermula dari kecemburuan pembagian ‘kue’ ekonomi dan pembangunan, khususnya daerah-daerah yang berada di ujung-ujung wilayah negara. Tapi bisa juga terjadi dengan berdasarkan beberapa alasan mendasar lainnya, semisal belief atau kepercayaan atau mungkin ideologi. Bahkan, beberapa alasan terbentuknya sebuah pemerintahan negara atau kerajaan yang berdaulat oleh sebab terdapatnya kesamaan yang umum, antara lain semisal kesamaan: (1) belief atau kepercayaan atau agama; (2) kesamaan ras; (3) kesamaan ‘rasa’. Sebagai contoh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terbentuk karena kesamaan ‘rasa’ yaitu, “Tidak enak dijajah oleh Belanda.” Karenanya, hingga kini pemerintah Belanda bahkan beberapa orang ‘individu kekinian’ asli Belanda sering dengan sengaja mengeluarkan statement yang ‘meledak’ pemerintah dan rakyat

Indonesia bahwa Presiden pertama Republik Indonesia tidak akan mungkin mampu mempersatukan Indonesia jika tidak ada kehadiran Belanda (tepatnya yang datang saat itu adalah VOC atau Verenigde Oost Indische Compagnie) ke Nusantara. Mereka memberikan contoh keberadaan gerakan “Ganyang Malaysia” dan posisi Timor Leste yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi bagian integratif dari NKRI, karena sejarah keduanya tidak bersama Belanda (VOC) tapi bersama Inggris dan Portugis.

Seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai bapak teori Ilmu Negara, George Jellinek (1882) menerbitkan buku dengan judul “*Allgemeine Staatslehre*” (Ilmu Negara Umum), yang menjadi cikal-bakal lahirnya Ilmu Negara yang dalam perkembangannya lalu dikenal di beberapa negara Eropa Kontinental dengan beberapa istilah, antara lain: (1) di Belanda dengan istilah *Staatsleer*; (2) di Jerman dengan istilah *Staatslehre*; (3) di Perancis dengan istilah *Theorie d’etat*, dan (4) di Inggris dikenal dengan istilah *Theory of State*, atau *The General Theory of State, Political Science*, atau *Politics*. Dalam menyusun bukunya *Allgemeine Staatslehre*, Jellinek (1882) menggunakan *Methode van Systematesering* (Metode Sistematisasi), menjelaskan tentang kelahiran sebuah negara bahwa terdapat dua tahap terbentuknya negara, yaitu:

(1) Tahap Primer:

Yaitu Pendekatan Faktual, bagaimana kelompok orang atau persekutuan masyarakat sederhana yang lalu berkembang menjadi suatu negara modern. Menurutnyanya lebih lanjut, bahwa terdapat 4 tahapan primer terbentuknya sebuah negara yaitu: (a) Primpersekutuan masyarakat atau kelompok sosial; (b) kerajaan; (c) negara; (d) negara demokrasi. Lalu

(2) Tahap Sekunder:

Yaitu pendekatan bagaimana terbentuknya negara baru yang dihubungkan dengan pengakuan dari negara lain yang memiliki unsur deklaratif.

Sejarah mencatat sebuah kejadian pada tanggal 10 Maret 1909, telah terjadi sebuah perjanjian antara Inggris dengan Kerajaan Siam (baru sejak 1939 berubah menjadi Thailand), yang berisi “kesepakatan” bahwa Inggris bersedia menyerahkan secara resmi negara-negara Melayu di utara kepada Kerajaan Siam. Negara-negara Melayu di utara yang dimaksud Inggris itu, adalah: (1) Patani; (2) Narathiwat; (3) Yala; (4) Songkhla; dan (5) Satun, untuk menjadi milik integratif wilayah Kerajaan Siam. Sedangkan wilayah negara Melayu utara Malaysia lainnya, yaitu: (1) Kedah; (2) Kelantan; (3) Perlis; dan (4) Trengganu, diberikan pada pemerintah Malaysia. Sejak itulah dimulai timbulnya benturan budaya antara Muslim etnis Melayu dengan Budha Trevada Thailand. Populasi Muslim etnis Melayu menentang penggabungan ini karena mereka telah merasa nyaman hidup di bawah kepemimpinan Kesultanan Muslim.



Gambar: 1.4 Kerajaan Pattani Abad XIV-XVIII Masehi (Sumber: www.google.com)

Mereka merasa lebih baik memilih untuk berintegrasi ke dalam negara sesama etnis Melayu, atau memerintah sendiri secara independen daripada harus bergabung dengan Kerajaan Siam. Kondisi tersebut diperburuk oleh metode kebijakan pemerintah Thailand yang selalu

menggunakan pendekatan senjata dalam aksi militernya untuk meminggirkan budaya Muslim etnis Melayu agar diganti dengan budaya Buddha Trevada Thailand.

Semakin diperburuk dengan kejadian di sekitar tahun 1940-an, dipimpin oleh Amerika Serikat, pemerintah Kerajaan Thailand yang baru setahun berubah nama menjadi Kerajaan Thailand oleh partai nasionalis Phibun Songkhram, meluncurkan sebuah kebijakan asimilasi besar di Thailand. Akibatnya sudah dapat dibayangkan, berujung kepada terciptanya kebencian berkelanjutan dari pihak Muslim etnis Melayu kepada pemerintahan Kerajaan Thailand. Kebijakan asimilasi hasil usungan partai nasionalis “Phibun Songkhram” itu melahirkan situasi darurat di Thailand, ketika mencoba memaksa para Muslim etnis Melayu untuk menghilangkan identitas mereka, baik identitas sebagai Melayu maupun sebagai Muslim. Semisal, untuk penduduk Muslim pria dilarang memakai sarung dan para Muslimah dilarang mengenakan jilbab atau tudung. Semua penduduk Thailand selatan dari Muslim etnis Melayu benar-benar diwajibkan untuk menghilangkan identitas serba atribut yang mereka sebut sebagai “orang Islam Melayu tradisional”. Bahkan, merekapun dilarang untuk bercakap-cakap di dalam bahasa Melayu nenek moyang mereka.

Lebih lanjut, penduduk Thailand Muslim etnis Melayu diharapkan untuk segera mengadopsi nama Thailand di luar nama Muslim yang mereka miliki. Puncaknya adalah ketika mereka juga dilarang mempraktikkan ajaran ibadah dalam agama Islam dengan alasan bahwa agama Buddha adalah dasar negara dan merupakan agama dominan dari Thailand. Politik identitas memang kerap dipakai sebagai ‘senjata pamungkas’ untuk mengalahkan lawan politik. Kompetisi politik seringkali memelintir penggalan dan menenggelamkan akal sehat, bahwa secara kasat mata fakta menunjukkan bahwa masyarakat Muslim etnis Melayu sangat kuat memegang akar-tradisi kepercayaan Islamnya.

Haidt (2012) di dalam bukunya yang berjudul “*The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion*” menjelaskan bahwa standar moralitas manusia pertama-tama dibentuk oleh intuisi nilai-nilai moral komunal, antara lain kepercayaan, keyakinan, dan religi, lalu kemudian baru akal budi memberikan justifikasi, merelativisasi atau menolak nilai-nilai tersebut ketika kemudian disadari bahwa melalui politik identitas potensi konflik horizontal besar mengancam. Dalam konteks suasana politik internal pemerintah Kerajaan Thailand saat itu melakukan beberapa hal yang dianggap melukai masyarakat Muslim etnis Melayu di wilayah selatan. Semisal ketika pemerintah Thailand menghapuskan pengadilan Islam yang telah didirikan untuk mengatur urusan keluarga Muslim. Disusul dengan upaya paksa kepada para pelajar Muslim etnis Melayu di wilayah selatan untuk memberikan penghormatan kepada gambar Buddha yang ditempatkan di sekolah umum. Mereka yang menolak untuk mematuhi kebijakan ini lalu ditahan, bahkan beberapa disiksa. Meskipun, akhirnya kebijakan ini kemudian dicabut, namun bekas konflik yang selalu meninggalkan luka berdampak buruk bagi kualitas hubungan psikologis antara pemerintah Kerajaan Thailand dan rakyatnya sendiri di wilayah selatan.

Ketika situasi dan kondisi di wilayah selatan Thailand dengan realitas sosial-budaya-religi menghasilkan kebijakan yang berujung pada fokus aksi militer belakangan ini, sebenarnya sejak tahun 1860-an di wilayah lain Kerajaan Thailand khususnya di kota Bangkok di sepanjang pemerintahan Raja Rama IV atau Raja Mongkut (ayahanda Raja Chulalongkorn), juga hadir duta-duta Islam damai dari Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim etnis Jawa yang berasal dari Kendal, Yogyakarta, dan Surabaya, dan sebagian lagi dari Sulawesi yang berasal dari Makassar, mulai dari usaha dagang hingga kemudian bermigrasi ke Thailand. Kedatangan mereka awalnya adalah atas inisiatif individu di dalam perdagangan kain batik yang khas Indonesia (Hamid and Aslam, 2017).

Di dalam sebuah wawancara mendalam Marifah Rambhai Dahlan sebagai cucu tertua dari Haji Muhammad Saleh pendiri Masjid Jawa di Sathorn, Bangkok mengungkapkan bahwa bahwa sang kakek menjadi makmur bukan hanya karena berdagang batik semata, namun juga termasuk transaksi perdagangan beragam hasil bumi dari kampung asalnya di Jawa Tengah dengan mancanegara, dengan fokus perdagangan dengan China. Lebih jauh lagi pada tahun 1860-an ke atas, oleh karena didorong oleh perjanjian antara kolonial Belanda di Indonesia dengan Kerajaan Siam (kini Thailand), migrasi penduduk Indonesia ke sana menjadi semakin besar. Kemungkinan untuk bermigrasi menjadi lebih terbuka lagi, oleh karena di dalam perjanjian yang dilakukan juga termasuk menerapkan prinsip “ekstrateritorialitas” yang memperluas hak hukum bagi orang Indonesia (masyarakat jajahan Belanda di wilayah Hindia Belanda atau (*Oost Indische*), yang juga ‘boleh dianggap’ sebagai warga Belanda. Hasil dari penerapan prinsip “ekstrateritorialitas” tadi kemudian jadi bermunculan kluster-kluster pemukiman orang asal Indonesia, khususnya di kota Bangkok.

Kluster dari masyarakat Jawa yang bermukim di kota Bangkok, berada di Kampung Jawa. Khususnya berada di wilayah Sathorn, dimana kluster tersebut berdekatan dengan kluster masyarakat Makassar domisilinya berada di Kampung Makassan. Nama Kampung Makassan ini diambil dari nama Makassar, yang berasal dari kota Makassar di Sulawesi Selatan, wilayah ini dikenal dengan nama Pratum di kota Bangkok. Sayangnya masyarakat keturunan Makassar di kota Bangkok ini tidak mudah ditemukan lagi sebagaimana kita dengan mudah menemukan masyarakat kota Bangkok keturunan Jawa. Pada kawasan-kawasan lain di distrik Yanawa dan distrik Lumpini Park juga kemudian hari didirikan banyak masjid, yang dibangun dengan peruntukkan beribadah ummat Islam migran asal Indonesia dan juga asal negeri lainnya (Mustafa, M, Atikbud RI Bangkok, 2017).

Kesimpulan

Bahwa sesungguhnya, sejak kedatangan Islam pertama kali di Kerajaan Thailand yaitu di kota Ayutthai, telah meninggalkan tapak bukti kehadirannya, hingga berkembangnya kini bersamaan dengan masuknya pemeluk agama Islam lain dari mancanegrara, hidup secara harmonis. Sekalipun terdapat pergolakan di wilayah Selatannya dalam jangka waktu yang tidak sebentar, akibat dari perjalanan sejarah yang dipaksakan, namun secara umum kehidupan bermasyarakat masyarakat Muslim di Thailand hingga kini dalam kondisi kondusif.

Referensi

- Abidin, Yumetri. (2020). Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia, Editor: Neni Iska, Zikri. Cet. 1 – Jakarta: Lembaga Penerbitan, UNAS.
- Atikbud RI Bangkok (2017). Thailand Selayang Pandang (Buku Saku). Jakarta: Kemendikbud RI.
- Encyclopedia Britanica. Sukhothai Kingdom Historical Kingdom, Thailand.
<https://www.britannica.com/place/Sukhothai-kingdom>, diunduh pada 14 Mei 2021.
- LePoer, B.L ed. (1997). Ayutthaya: The Final Phase, Thailand: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress.
- Brown, R. A. (2013). Islam in Modern Thailand: Faith, Philanthropy and Politics. London: Routledge.
- Dania, M. (2016). Diary di Bangkok. Yogyakarta: Ladang Kata.

- Deleuze, G and Guattari, F. (1989). *Schizoanalytic Cartographies*. London: Bloomsbury.
- Forbes, A and Henley, D. (2012). *Lamphun's Little-Known Animal Shrines' in: Ancient Chiang Mai, Volume 1*. Chiang Mai: Cognoscenti Books.
- Haidt, J. (2012). *The Righteous Mind: Why good People are Divided by Politics and Religion*. New York: Pantheon Books.
- Hamid, M.F.S and Aslam, M. (2017). *Intra-regional Trade Effects of ASEAN Free Trade Area in the Textile and Clothing Industry*. *Journal of Economic Integration*, Vol. 32, No. 3 (September 2017), pp. 660-688.
- Hasan, A.A.M. (1996). *Penyebaran Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Lentera.
- Haque – Fawzi, Marissa Grace; Amiruddin, Jaorana; Dania, Maya; dan Juwitasari, Reni. (2018). *Jawa dan Halal di Thailand*. Jakarta: al-Wasath.
- Haque – Fawzi, Marissa Grace. (2019). *Muslimin Vietnam dan Industri Halalnya: Mereka Juga Belajar ke LPPOM MUI*. Bekasi: Gramata.
- Hardiani, V dan Haque, M.G. (2020). *Analisis Strategi Pemasaran LPH (Lembaga Pemeriksa Halal): Studi Pada Kantor Pusat SBU KSP PT Sucofindo (Persero)*, Jakarta. *SENIMA - Seminar Nasional Manajemen 5*, p. 1615-1639.
- Jellinek, G. (1882). *Allgemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum)*. Berlin: O Häring.
- Kantor Statistik Nasional Thailand (2005). diunduh pada 13 Januari 2015.
- KBRI Bangkok. (2017). *Thailand*. Jakarta: Kementrian Luar Negeri RI.
- LePoer, B. L (ed). (1987). *Thailand: A Country Study*. Washington: GPO for the Library of Congress.
- Mania. (2019). *Perkembangan Sosial Islam di Thailand*. *Al Ma' arief: Jurnal Pendidikan SOSIAL dan Budaya*, Vol 1, No 1, p. 44-54. Makassar: UIN Alauddin.
- Muzani, S. (1993). *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Marchinkowski, C. (2005). *Persians and Shi'ites in Thailand: from Ayutthaya Period to Present*. *Nalanda-Sriwijaya Centre Working Paper, Series No.15, Feb 2014*. Pasir Panjang, Singapore: The Nalanda-Sriwijaya Centre Institute of Southeast Asian Studies.
- Pitssuwan, S. (1989). *Islam di Muangthai*. Jakarta: LP3ES.
- Thailand PRD – กรมประชาสัมพันธ์, <https://thailand.prd.go.th>, diunduh pada 15 Mei 2021.
- The Bangkok Periode (1767 - 1932)*, *Thailand A Country Study*.
<http://countrystudies.us/thailand/17.htm>, diunduh pada 14 Mei 2021.
- The Chakkri Dynasty Thailand*. <http://countrystudies.us/thailand/14.htm>, diunduh pada 14 Mei 2021.